

ANALISIS SITUASI DAN ASSESSMENT PENGELOLAAN SAMPAH

KOTA PALANGKA RAYA & KABUPATEN KATINGAN
MARET 2025



© WWF-Indonesia / Julian Hahne



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB 1: PENDAHULUAN	5
BAB 2: GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH	6
BAB 3: TANTANGAN & HAMBATAN	9
BAB 4: PELUANG DAN REKOMENDASI STRATEGIS	10
BAB 5: KESIMPULAN	11

Penulis
Marta Yenni AKS., S.P

Pengulas
Sekti Mulatsih
Tri Agung Rooswiadji
Arum Kinasih

Publishing Office
Plastic Smart Cities Indonesia
plasticsmartcities.wwf.id

© 2025
Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor,
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

For contact details and further information, please visit www.wwf.id

Cover photography: © WWF-INDONESIA / Julian Hahne

RINGKASAN EKSEKUTIF

a. Tujuan Utama Analisis

Dalam rangka menindaklanjuti program Plastic Smart Cities (PSC) di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan, dilakukan identifikasi terhadap kondisi *eksisting* pengelolaan sampah di kedua wilayah. Proses ini bertujuan untuk menilai capaian yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang ada dalam mendukung program PSC. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, akan diberikan rekomendasi strategis guna memperkuat dan memperluas implementasi program PSC di masa depan, dengan fokus pada pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Ringkasan Kondisi Pengelolaan Sampah

Kota Palangka Raya menghasilkan total timbulan sampah sebesar 58.491,25 ton per tahun dengan dominasi sampah organik dan plastik. Kota ini telah memiliki infrastruktur pengelolaan yang cukup lengkap, mulai dari TPA, TPST, TPS 3R, PDU, bank sampah, hingga depo dan kontainer. Di TPA, diterapkan sistem *cover soil landfill* dan pemanfaatan gas metana. Kegiatan pengolahan juga dilakukan di PDU Kecamatan Pahandut, yang mampu memproduksi *paving block* dan bekerja sama dengan Bank Sampah Kapakatitah. Inisiatif masyarakat juga berkembang, seperti kegiatan *up-cycle* plastik di Kelurahan Kereng Bangkirai serta TPS 3R mandiri di Pahandut Seberang. Sementara itu, Kabupaten Katingan menghasilkan sekitar 12 ton sampah per hari. Pengelolaan masih terbatas pada dua kecamatan, dengan fasilitas seperti TPS 3R, bank sampah, dan kontainer pengganti depo. TPA di wilayah ini masih menggunakan sistem *open dumping* dan berpotensi ditutup. TPS 3R Merpati menjadi unit paling aktif, dengan pengelolaan hingga 9 ton sampah daur ulang per bulan. Di luar jangkauan layanan DLH, praktik pembuangan sampah masih belum terkelola dengan baik.

c. Tantangan utama yang ditemukan

Tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Kondisi ini menghambat efektivitas program-program pengelolaan sampah yang ada. Selain itu, belum terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan media massa dalam upaya kolaboratif menangani masalah sampah juga menjadi hambatan. Pengelolaan sampah semakin terbatas akibat minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat, baik di tingkat kota maupun kabupaten. Meskipun telah ada berbagai kebijakan, alokasi sumber daya yang belum optimal mengakibatkan implementasi program pengelolaan sampah yang kurang efektif, sehingga pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan masih sulit terwujud.

d. Rekomendasi kebijakan atau langkah strategis.

Peningkatan sosialisasi menjadi langkah penting dalam pengelolaan sampah, dengan melibatkan proyek percontohan di sekolah-sekolah, rumah tangga, serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pemilahan dan pengelolaan sampah. Membangun forum kolaborasi antara pemerintah, universitas, sektor swasta, dan media untuk memperkuat visi bersama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. WWF dapat berperan dalam mendukung komunikasi antara sektor swasta dan universitas, serta memperluas perspektif pengelolaan sampah dalam konteks keberlanjutan ekologi. Pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting, dengan mengoptimalkan peran kampus melalui pelatihan dan program *Training of Trainers* (TOT) untuk mahasiswa, serta membentuk fasilitator lokal yang dapat mendukung kegiatan pengelolaan sampah di lapangan. Untuk itu, pengalokasian anggaran yang lebih besar dari APBD dan sektor swasta melalui CSR dan *Extended Producer Responsibility* (EPR) sangat diperlukan. Selain itu, kerjasama dengan universitas dalam riset terkait teknologi pengolahan plastik dan pemilahan sampah yang lebih aman dan efektif akan mendukung inovasi dalam pengelolaan sampah. Peran media massa juga sangat krusial untuk mempublikasikan kegiatan pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam upaya ini.

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Analisis ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut program **Plastic Smart Cities (PSC) di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan**, yang sebelumnya telah diawali dengan kegiatan workshop serta kunjungan lapangan ke TPS 3R Joe dan TPS 3R Mekarwangi di Bogor.

Tujuan utama dari *assessment* ini adalah untuk menggali dan memetakan kondisi aktual di lapangan, khususnya terkait capaian, tantangan, serta peluang dalam pengelolaan sampah di kedua wilayah. Selain itu, *assessment* ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan serta langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran guna memperkuat implementasi program PSC secara berkelanjutan dan kolaboratif.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam *assessment* ini adalah gabungan dari beberapa pendekatan yaitu, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan, observasi langsung ke lokasi pengelolaan sampah seperti TPS 3R, PDU, bank sampah dan kawasan pemukiman, serta analisis data sekunder dari dokumen dan presentasi yang diberikan oleh DLH.

Kota Palangka Raya terdiri dari **5 kecamatan dan 30 kelurahan, sementara Kabupaten Katingan mencakup 7 kecamatan, 154 desa, dan 7 kelurahan**. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, DLH Kabupaten Katingan, serta para pengelola Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) dan 1 unit Pusat Daur Ulang (PDU) di Palangka Raya.



BAB 2

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH

KOTA PALANGKA RAYA

Produksi Sampah:

Kota Palangka Raya terdiri dari **5 kecamatan dan 30 kelurahan**, serta memiliki satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan luas mencapai **10 hektar**. Berdasarkan data terbaru, total tonase sampah yang dihasilkan di Kota Palangka Raya mencapai **58.491,25 ton per tahun dengan tonase perhari sebesar 160,25 ton**.

Sumber Sampah: Sumber utama timbulan sampah di Kota Palangka Raya berasal dari berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah tangga: 46,47%
- Pasar: 13,91%
- Kegiatan perniagaan: 20,24%
- Perkantoran: 10,12%
- Fasilitas umum : 5,77%
- Kawasan : 2,27%
- Lain : 10,73%



Sistem Pengumpulan dan Transportasi:

Kota Palangka Raya telah memiliki sejumlah infrastruktur pendukung dalam sistem pengelolaan sampah. Terdapat **43 Tempat Penampungan Sementara (TPS)** yang tersebar di berbagai lokasi sebagai titik awal pengumpulan sampah dari masyarakat. Selain itu, terdapat **25 depo mini** dengan kapasitas tampung **satu kontainer**, serta **3 depo besar** yang masing-masing mampu menampung hingga **empat kontainer**. Untuk mendukung mobilitas dan efisiensi pengangkutan, tersedia pula **56 titik penempatan kontainer**. Proses pemantauan volume sampah juga dilengkapi dengan **satu unit jembatan timbang**. Untuk mendukung sistem pengumpulan dan distribusi sampah Kota ini juga memiliki **15 truk dump, 11 armroll, 8 unit pick up, 70 unit kendaraan roda 3, 1 unit excavator, 1 unit bulldozer, dan 1 unit wheel loader**.

Jenis Sampah: Komposisi sampah yang dihasilkan didominasi oleh

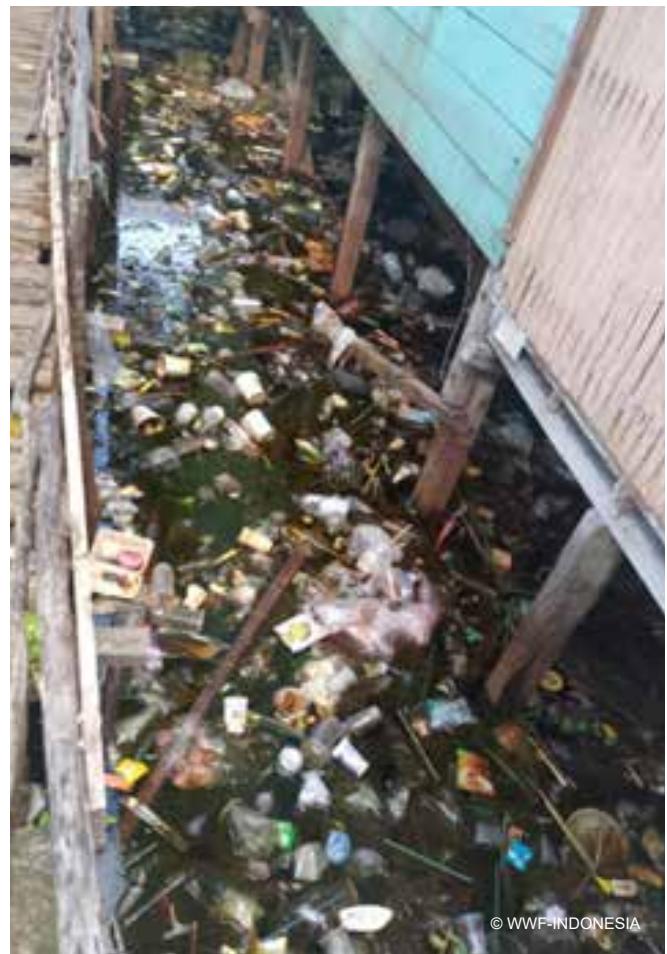


JENIS SAMPAH	JUMLAH %
Organik (Sisa Makanan)	41,80%
Plastik	19,74%
Kertas	8,66%
Logam	2,31%
Kain	2,36%
Karet/Kulit	2,18%
Kaca	2,04%
Kayu/Ranting	4,33%
Residu	16,58%



Fasilitas Pengolahan dan Daur Ulang:

Kota Palangka Raya memiliki berbagai fasilitas pengelolaan sampah yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapat 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan luas 10 hektar, 1 unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan 6 unit Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R) dan 43 TPS. Selain itu, terdapat 62 unit Bank Sampah, 1 unit Bank Sampah Induk serta 1 unit Pusat Daur Ulang (PDU) yang dilengkapi dengan konveyor, mesin cacah dan peleleh.



Peran Sektor Informal:

- **Pemulung:** Di Pusat Daur Ulang (PDU) Kecamatan Pahandut, pemulung memiliki peran penting dalam menyotorkan sampah daur ulang ke Bank Sampah Kapakatitah. Kegiatan ini difasilitasi oleh pengelola PDU yang memberikan ruang dan dukungan operasional bagi sektor informal untuk terlibat aktif dalam pengumpulan dan pengelolaan sampah daur ulang.
- **Pengrajin Upcycle:** Di Kelurahan Kereng Bangkirai, terdapat inisiatif individu oleh warga bernama Bapak Gampang yang mengolah plastik HDPE bekas, seperti tutup botol, menjadi produk kerajinan bernali jual.
- **Pengelola TPS 3R Mandiri:** Di TPS 3R Pahandut Seberang, pengelolaan dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mereka melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal (sekitar 40 pelanggan) dalam aktivitas pemilahan dan pengumpulan sampah, serta mengelola Bank Sampah Dalinga di lokasi yang sama.



Kebijakan dan Regulasi yang Berlaku:

Kota Palangka Raya telah memiliki Perwali No. 43 Tahun 2017 tentang jam buang sampah untuk mengatur pengumpulan dan mencegah penumpukan sampah. Namun, implementasi prinsip CSR belum optimal, dan alokasi anggaran APBD untuk sektor persampahan masih terbatas, sehingga membatasi pengembangan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.



Produksi Sampah:

Kabupaten Katingan, memiliki luas wilayah sekitar **2 juta hektar dan terdiri atas 7 kecamatan, 154 desa, serta 7 kelurahan**. Sekitar **13%** dari wilayah ini berstatus **Areal Penggunaan Lain (APL)**, yang diperuntukkan bagi permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta Hak Guna Usaha (HGU). Volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setiap harinya mencapai **sekitar 12 ton**.

Jenis Sampah : Komposisi sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah Botol Plastik

Di Kabupaten Katingan, produksi sampah harian mencapai sekitar 12 ton per hari. DLH Kabupaten Katingan baru dapat mengalami 2 kecamatan dengan komposisi yang didominasi oleh sampah anorganik dan residu yang

masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sementara sampah organik seperti sisa makanan sebagian besar diklaim telah habis dimanfaatkan langsung di sumber oleh para peternak. Sampah plastik menjadi komponen terbesar yang masuk ke dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah ini.

Sumber Sampah: Sumber utama timbulan sampah di Kota Palangka Raya berasal dari berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah tangga
- Perkantoran
- Kegiatan perniagaan
- Fasilitas umum (fasum)



Sistem Pengumpulan dan Transportasi:

Sistem pengumpulan dan transportasi sampah di Kabupaten Katingan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari enam unit TPS 3R yang ada, hanya dua lokasi yang dapat beroperasi dengan baik, sementara sisanya belum optimal akibat keterbatasan operasional. Kabupaten ini belum memiliki depo sampah resmi, sehingga pengumpulan difasilitasi melalui *container* atau *armroll* yang disebar di berbagai titik strategis. Pengangkutan sampah dilakukan secara berkala, seperti di TPS 3R Merpati Kasongan yang merupakan unit paling aktif, dengan jadwal pengangkutan setiap dua hari. Namun, masih banyak wilayah yang belum terlayani secara maksimal oleh DLH, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah ke sungai atau membakarnya. Selain itu, kondisi TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping* membuatnya terancam untuk ditutup, menambah urgensi terhadap perbaikan sistem transportasi dan pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan.



Fasilitas Pengolahan dan Daur Ulang:

Fasilitas pengolahan dan daur ulang sampah di Kabupaten Katingan masih terbatas. Terdapat enam unit TPS 3R, namun hanya dua yang beroperasi aktif karena keterbatasan biaya operasional. Terdapat juga 8 bank sampah di dua kecamatan, namun belum ada depo sampah resmi, menggantinya dengan *container* yang diletakkan di titik strategis. TPS 3R Merpati di Kasongan merupakan yang paling aktif dengan dukungan subsidi dari DLH Katingan untuk BBM, armada, dan listrik. TPS ini mampu mengelola hingga 9 ton sampah daur ulang per bulan dari 150 pelanggan dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan pelapak biasa, mencapai Rp3.000/kg.



Peran Sektor Informal:

Terdapat 8 bank sampah yang beroperasi di Kabupaten Katingan, sebagian besar dikelola oleh sekolah dasar dan komunitas masyarakat, tetapi tidak semuanya berjalan dengan baik. Bank sampah ini berfungsi untuk mengumpulkan sampah daur ulang dari warga dan menjualnya ke TPS 3R, khususnya TPS 3R Merpati di Kasongan, yang menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan dengan pelapak biasa.



Kebijakan dan Regulasi yang Berlaku:

Di Kabupaten Katingan, hingga saat ini belum ada peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan sampah, yang menjadikan pengelolaan sampah kurang terstruktur dan terkoordinasi. Selain itu, penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) juga CSR belum terlihat secara jelas, sehingga sektor produsen dan swasta masih kurang berperan dalam pengelolaan sampah pascakonsumsi. Banyak lokasi strategis yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah terkendala oleh status kawasan yang berstatus lahan kuning, yang membatasi pengembangan fasilitas pengolahan sampah di daerah tersebut. Geografis Kabupaten Katingan juga menjadi kendala utama untuk melakukan pengumpulan sampah termasuk penjualan sampah daur ulang yang harus menempuh jarak cukup jauh ke Palangka Raya. Meskipun demikian, terdapat potensi besar dari pelapak lokal, yang dapat memperkuat rantai pasok daur ulang dan mendukung ekonomi sirkular di Kabupaten Katingan.

BAB 3

TANTANGAN & HAMBATAN

ASPEK REGULASI & KEBIJAKAN

- Lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
- Ketiadaan regulasi spesifik atau tidak adanya harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah.
- Kurangnya program sosialisasi ke masyarakat secara massif terkait pemilahan dan pengelolaan sampah.
- Kurangnya pemahaman bahwa sampah itu bukan komoditas melainkan biaya pengelolaan sehingga ketika berkegiatan semacam pengumpulan sampah yang layak didaur ulang tidak berpatokan pada harga jual yang tinggi melainkan kesadaran akan kondisi lingkungan saat ini.



ASPEK KEUANGAN & INSENTIF

- Minimnya pendanaan dan investasi di sektor pengelolaan sampah.
- Masih minimnya daya dukung dari *private sector* untuk turut andil dalam program pengelolaan sampah.
- Belum adanya incentif bagi pelaku kegiatan pengelolaan sampah yang memadai.

ASPEK TEKNIS & INFRASTRUKTUR

- Kurangnya fasilitas pemrosesan sampah (Kabupaten Katingan).
- Belum adanya perusahaan daur ulang di Palangka Raya.
- Sistem pengangkutan yang belum optimal dikarenakan petugas pengangkut sampah yang masih terbatas.
- Sarana dan prasarana yang belum bisa menjangkau daerah secara luas.

ASPEK SOSIAL & PERILAKU

- Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengurangan, pemilahan dan pengelolaan sampah.
- Partisipasi sektor informal yang belum diintegrasikan dengan sistem resmi.
- Masih adanya dorongan terkait harga jual sampah yang tinggi untuk mulai bergerak di masyarakat.

BAB 4

PELUANG DAN REKOMENDASI STRATEGIS

REKOMENDASI KEBIJAKAN



- Penguatan regulasi CSR, EPR dan incentif.
- Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data.
- Mendorong terbitnya peraturan-peraturan baru terkait program Pengurangan, Pemilahan dan Pengolahan sampah dari sumber sampah.

REKOMENDASI INFRASTRUKTUR



- Peningkatan investasi dalam fasilitas daur ulang, seperti mendorong adanya perusahaan daur ulang di kota Palangka Raya, (KLHK menggandeng ADUPI).
- Peningkatan efisiensi sistem pengumpulan dan pengolahan sampah.

REKOMENDASI SOSIAL & EKONOMI



- Kampanye kesadaran masyarakat terkait Pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah.
- Penguatan kapasitas dan pemberdayaan sektor informal dalam ekosistem pengelolaan sampah, seperti Universitas, *private sector* dan media massa.

BAB 5

KESIMPULAN

RINGKASAN TEMUAN UTAMA



Perbedaan Tingkat Infrastruktur dan Kapasitas Pengelolaan

Kota Palangka Raya telah memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang relatif lengkap dengan fasilitas TPA, TPST, TPS 3R, PDU, serta 62 bank sampah, meskipun dukungan anggaran dan implementasi EPR masih belum optimal. Sebaliknya, Kabupaten Katingan baru mampu mengelola sampah di dua kecamatan dengan fasilitas terbatas, dan masih mengandalkan sistem *open dumping* di TPA.

Peran Sektor Informal yang Signifikan

Baik di Palangka Raya maupun Katingan, sektor informal seperti pemulung, pengrajin *upcycle*, dan bank sampah memiliki kontribusi besar. Namun, peran mereka belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem formal pengelolaan sampah.

Tantangan Umum: Regulasi, Sosialisasi, dan Infrastruktur

Tantangan utama mencakup belum adanya Perda spesifik di Katingan, belum optimalnya implementasi EPR di kedua wilayah, keterbatasan fasilitas dan armada pengangkut, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengurangan sampah.

Kesenjangan Layanan dan Praktik Pembuangan yang Merugikan Lingkungan

Di Katingan, banyak wilayah belum terlayani pengelolaan sampah sehingga masyarakat masih membuang sampah ke sungai atau membakarnya. TPA di daerah ini juga tidak memenuhi standar karena masih menggunakan sistem *open dumping*.

Potensi Ekonomi dari Rantai Daur Ulang

Terdapat peluang besar dalam pengembangan ekonomi sirkular melalui pelapak lokal yang dapat langsung menyuplai hasil daur ulang ke pabrik, baik di Palangka Raya maupun dari TPS 3R aktif di Katingan seperti TPS 3R Merpati.

Kebutuhan Kolaborasi dan Inovasi Lintas Sektor

Disarankan untuk membentuk forum kolaboratif antara pemerintah, universitas, swasta, dan media, serta memperkuat pendidikan masyarakat melalui kampanye, pelatihan, dan proyek percontohan di sekolah atau komunitas lokal.



ARAH TINDAK LANJUT

1. Peningkatan kapasitas dari sisi pemerintah sendiri terkait konsep pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sampah.
2. *Workshop* dan FGD yang melibatkan sector formal, informal dan pelaku pengelolaan sampah.
3. Implementasi hasil dan monitoring evaluasinya.



© WWF-Indonesia / Julian Hahne



Working to sustain the natural
world for the benefit of people
and wildlife.

wwf.id

© 2025
Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Graha Simatupang Tower 2 Unit C 7th floor
Jalan TB Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta 12540
Tel. +62217829461 Fax. +62217829462

For contact details and further information, please visit wwf.id